

REALISASI DI KENDAL BARU 28%

Mendagri: Percepat Insentif Nakes

KENDAL (KR) - Tenaga kesehatan atau nakes merupakan ujung tombak penanganan Covid-19. Untuk itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Pemkab Kendal menginginkan angka penyerapannya harus tinggi. Saat mengetahui realisasi insentif nakes di Kendal baru mencapai 28 persen, Tito langsung meminta untuk segera dilakukan percepatan.

"Segera direalisasikan insentif nakes. Di Kendal masih 28 persen, di beberapa daerah bahkan sudah ada yang 100 persen. Meski demikian ada beberapa daerah yang sama sekali belum dan saya sudah memberikan teguran untuk

itu," ujar Tito, Kamis (29/7). Karena Kabupaten Kendal bupatinya baru, Tito meminta untuk segera cairkan melalui Badan Keuangan Daerah agar para nakes bisa secepatnya menerima insentif karena mereka sudah bekerja keras.

Selain insentif nakes, Mendagri juga meminta penurunan angka positif Covid-19. Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang nantinya harus menurun hingga ke Level 1, pihaknya meminta Pemkab Kendal untuk aktif dalam upaya penurunan tersebut.

Selain itu upaya kesembuhan juga harus ditingkatkan dengan treatment yang baik. "Prokes ketat jangan sampai

lengah, karena merupakan satu upaya menurunkan angka positif dan juga meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19, angka kematian juga harus ditekan sekecil mungkin," lanjutnya.

Sementara itu terkait insentif nakes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Fernando Bonny menjelaskan, pemberian insentif untuk para nakes yang bekerja untuk penanganan Covid-19 tahun 2021 yang sudah dicairkan Rp 4 miliar dari Rp 31 miliar yang dianggarkan. "Kami terus berupaya cairkan dana insentif nakes tersebut, insentif kami berikan bukan untuk semua nakes tapi untuk para nakes yang bekerja untuk penanganan Covid-19," ujar Ferry. (Ung)-f



'NGANYARI': Tim Kamboja Kalurahan Donoharjo, Ngaglik, Sleman, 'nganyari' baju hazmat sumbangan Pembaca 'KR', Rabu (28/7) malam. Saat ada permohonan bantuan pemakaman korban Covid-19, di Posko Kamboja kompleks Balai Desa Donoharjo para anggota tim langsung memakai APD gres tersebut serta bergegas ke lokasi yang membutuhkan untuk melakukan pemakaman dengan protokol kesehatan.

Danais

menggelar pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY terkait penanganan Covid-19, di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Kamis (29/7).

Sultan mengungkapkan, penggunaan APBD DIY dalam penanganan Covid-19 sudah direalisasikan sejak awal tahun termasuk hasil refocusing anggaran. Dana penanganan Covid-19 dari APBD 2021 sekaligus hasil refocusing anggaran Rp 326 miliar. Sampai saat ini sudah terealisasi sekitar Rp 140,9 miliar atau 43 persen. Sejumlah upaya terus dilakukan untuk menangani pandemi Covid-19 yang sampai saat ini kasusnya masih fluktuatif.

Sedangkan Sekda DIY Kadaramanta Baskara Aji mengungkap realisasi APBD DIY 2021 bagi penanggulangan Covid-19 termasuk refocusing yang mencapai Rp 326 miliar, dan telah terserap Rp 140,9 miliar. Artinya dari total alokasi APBD DIY 2021 bagi penanggulangan pandemi sudah direalisasikan setidaknya atau 43 persen per Rabu (28/7) lalu.

"Alokasi anggaran penanganan Covid-19 di DIY mencapai Rp 326 miliar, itu sudah ditambah yang refocusing. Sudah direalisasikan 43 persen," ujarnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat MT Panggabean menuturkan

Pemda menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Transfer Umum (DTU). Total alokasi belanja program pemulihan ekonomi daerah yang bersumber dari belanja wajib DTU di DIY sebesar Rp 443,42 miliar.

"Progres realisasinya telah mencapai Rp 78,07 miliar atau 17,61 persen pada Semester I 2021 Realisasi terbesar pada insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 mencapai 33,41 persen," imbuhnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta dalam jumpa pers di DPRD DIY usai audiensi dengan Gubernur DIY, Kamis (29/7) menyatakan, anggaran Belanja Tak Terduga yang digelontorkan DPRD DIY sebesar Rp 60 miliar untuk penanganan Covid-19 ternyata pelaksanaannya belum maksimal. Bahkan sampai saat ini dananya masih ada di atas Rp 50 miliar.

"Padahal dana tersebut dari awal sudah kita sampaikan dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, realisasinya masih sangat kecil. Padahal dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan akibat

dampak dari pandemi," ujarnya

Ada beberapa hal yang disampaikan DPRD DIY dalam audiensi yang berlangsung di Kepatihan tersebut. Selain mendesak pemaksimalan dana BTT, juga disinggung terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penggunaan dana istimewa (danais) untuk penanganan Covid-19. Jika mengacu pada PMK, maka danais dapat sampai ke desa-desa yang memang jangkauan ke masyarakatnya dapat lebih mudah.

"Pemerintah desa ke masyarakat tentu jangkauannya lebih pendek. Dibandingkan Pemda. Dalam waktu dekat kami juga akan segera melakukan perubahan APBD yang tentunya masih difokuskan untuk penanganan Covid-19," tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRD DIY Nuryadi meminta kepada masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri untuk segera pindah ke selter di bawah pengawasan rumah sakit. Terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya tidak memenuhi standar tempat isolasi. Karena di selter, kesehatannya terus dipantau.

Terkait bansos yang ditunggu oleh masyarakat, menurut Nuryadi saat ini tidak dapat jika datanya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (Ria/Ira/Awh/Bro)-d

Sambungan hal 1

Nelayan Perlu Dilindungi Asuransi

CILACAP (KR) - Program Pemerintah melalui Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) perlu didukung semua pihak. Melalui asuransi para nelayan akan mendapatkan jaminan pertanggungan dari risiko kematian, cacat, dan biaya pengobatan.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Ditias Pradipta melalui Kasi Pemberdayaan Nelayan Saiful Purnamaji, asuransi nelayan yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat bermanfaat bagi nelayan dan keluarga nelayan. "Nelayan dapat perhatian lebih dari Pemerintah, karena punya risiko tinggi dalam operasi penangkapan ikan," ucapnya, Kamis (29/7).

Melalui asuransi nelayan, para nelayan maupun keluarga bisa menerima manfaat bila terjadi kecelakaan. Bahkan manfaat yang didapat bisa mencapai Rp 200 juta manakala kecelakaan mengakibatkan kematian. Kondisi itu tentu tidak diharapkan siapa pun, namun bila-mana terjadi, keluarga atau ahli waris akan sangat terbantu. "Asuransi mengcover kecelakaan yang mengakibatkan meninggal, cacat, serta biaya pengobatan," tutur Saiful.

Pada awal peluncuran Program Asuransi Nelayan, Pemerintah memberikan BPAN.

Namun bantuan itu sifatnya stimulan untuk satu tahun. Dinas Perikanan Cilacap mengusulkan 9.000 nelayan untuk mendapatkan BPAN pada 2016. "Berikutnya nelayan sudah harus ikut asuransi secara mandiri," katanya.

Kepala Cabang PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo Semarang Umam mengatakan, sasaran BPAN adalah nelayan yang memenuhi syarat, yakni WNI, aktif sebagai nelayan dengan memperlihatkan KTP dan surat pernyataan dari Dinas Perikanan setempat yang menyatakan dirinya adalah nelayan.

"BPAN juga menyasar nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh, serta memenuhi beberapa syarat lainnya seperti tidak menggunakan alat penangkapan yang terlarang berdasarkan peraturan Pemerintah," lanjut Umam.

Setiap nelayan wajib membayar premi Rp 175.000 pertahun, sudah mendapatkan pertanggungan risiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan cacat.

Asuransi Jasindo yang merupakan bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) mencatat, di Jawa Tengah sekitar 30.000 nelayan sudah terdaftar sebagai nasabah asuransi nelayan sejak 2019. (San)-f

Greysia/Apriyani

babak semifinal olimpiade. Sedangkan dari dua pemain tunggal putra Indonesia yang bertanding di babak 16 Besar kemarin, yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie (Jojo), hanya Anthony Ginting yang berhasil melaju ke babak perempatfinal. Sedangkan Jojo harus gugur di babak pertama, usai dikalahkan tunggal putra China Shi Yu Qi dengan dua game

langsung 11-21, 9-21. Sedangkan Anthony Ginting lolos ke perempatfinal, usai menjungkalkan tunggal putra wakil tuan rumah Jepang Kan'ta Tsuneyama dengan straight-set 21-18, 21-14.

Pasangan Greysia/Apriyani pun bersyukur atas kemenangan tersebut dan mengaku tidak ingin merayakannya secara berlebihan mengingat masih ada lawan

yang harus mereka hadapi pada pertandingan berikutnya di semifinal.

"Sebetulnya kami sangat emosional dengan hasil ini, tapi kami memilih untuk tidak terlalu merasakannya karena kami masih memiliki pertandingan lain. Hari ini (kemarin-red) kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami bisa sampai ke semifinal," ungkap Greysia, dilansir laman Antara. (Rar)-d

Sambungan hal 1

UMKM

Karenanya, pemetaan terhadap urgensi kebangkitan pasca-PPKM darurat khususnya dan pandemi pada umumnya harus segera dilakukan pusat atau daerah. Tentu agar kondisi ini tidak semakin parah. Viralnya sejumlah pedagang kecil di berbagai daerah dengan mengibarkan bendera putih yang dikontotasikan menyerah, harus mendapat perhatian penuh.

Malioboro sendiri mendeskripsikan kondisi UMKM dan sektor informal yang tumbuh di Yogya dan sekitarnya. Ketika terjadi PSBB dan berlanjut menjadi PPKM darurat yang diperpanjang — imbas ke transaksi di Malioboro menyeret ke semua aspek. Padahal, mata rantai dibalik transaksi sepanjang Malioboro tidaklah kecil. Ada puluhan ribu orang di baliknya. Baik warga asli Yogya ataupun perantau yang mengadu nasib dan juga mencari peruk nasi di emperan Malioboro Yogya.

Karenanya, fakta kejadian di sepanjang Malioboro tidak bisa dianggap remeh. Bukan tidak mungkin kejadian ini juga muncul di daerah lain. Jika tokonya saja tumbang, bagaimana pedagang kakilima (PKL) yang selama ini menghidupkan Malioboro?

Mata rantai yang terputus dari dampak tutupnya deretan toko di Malioboro, bisa dipastikan akan berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran dan tentu

juga kemiskinan. Padahal selama ini peran dan kinerja UMKM sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan menyumbang kontribusinya ke PDB. Bahkan di masa krisis dan resesi yang lalu perannya juga bisa menyelamatkan perekonomian domestik, sementara banyak korporasi yang tumbang?

Artinya, pemerintah baik provinsi maupun kota harus cermat melihat kasus ini. Setidaknya kucuran bansos perlu untuk diberikan kepada para pedagang kecil, pelaku UMKM dan sektor informal yang terdampak PPKM darurat dan pandemi satu setengah tahun terakhir, harus disegerakan.

Kalkulasi besaran dampak PPKM darurat dan pandemi sejatinya bukan hanya ke sektor informal dan UMKM tapi juga kesemuanya. Survei BI menyebut bahwa 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% di antaranya terdampak dari aspek penjualan. Sementara hasil secara umum menjelaskan imbas dari pandemi adalah terhadap pendapatan, laba dan arus kas. Sehingga beralasan jika mayoritas sektor informal dan UMKM

Kini justru lebih bersikap *wait and see* sambil melihat perkembangan. Bukan tidak mungkin jika situasinya akan berubah menjadi *wait and worry*. Karena tampaknya, vaksinasi berdampak euforia

yang akhirnya memicu sentimen negatif apalagi munculnya varian baru covid.

Problem UMKM dan sektor informal selama pandemi sejatinya tidak hanya pendapatan menurun. Tapi juga kemampuan membayar kredit sebagai imbas dari turunnya laba karena omzet turun dan juga daya beli masyarakat yang meredup. Hasil survei BI juga menjelaskan bahwa pengembangan kredit UMKM 2020 di angka minus 1,8% dan kualitas kredit masih dibawah yaitu kisaran 3,95%. Juga distribusi rekening kredit masih didominasi usaha kecil (13,2%), usaha menengah (14,4%). Fakta dari 6 sektor UMKM ternyata hanya usaha di bidang pertanian yang bisa tumbuh 16,7%, industri pengolahan tumbuh 1,5%, konstruksi minus 17,9%, perdagangan minus 3,2%, real estate naik 13% dan jasa kemasyarakatan naik 2%.

Sejumlah pedagang di Malioboro tumbang karena tidak mampu bertahan akibat PPKM darurat dan pandemi. Ironi dari kasus ini harus dicermati. Karena Malioboro masih menjadi ikon Yogya. Seperti lagu Yogyakarta-nya KLa Project : "*pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.....*". Jangan sampai pandemi membuat lagunya direvisi.

(Penulis adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo)-f

Sambungan hal 1

Aksesibilitas

menghubungkan YIA di Kulonprogo dengan Stasiun Tugu Yogyakarta. KA Bandara akan semakin melengkapi pilihan moda transportasi lanjutan yang kini telah ada di YIA. Seperti *shuttle bus*, taksi bandara (taksi reguler dan taksi daring), bus Damri, KA dari stasiun terdekat (Stasiun Tugu) dan lainnya.

PTS General Manager YIA Agus Pandu Pumama mengatakan, YIA memiliki luas terminal 219.000 m2 dan total luas area bandara

mencapai 587 hektare, sehingga menjadikan salah satu bandara terbesar di Indonesia dengan kapasitas saat ini mampu menampung hingga 20 juta penumpang pertahun atau 11 kali lebih besar dari Bandara Adisutjipto yang hanya dapat menampung 1,6 juta penumpang pertahun.

"Pada kapasitas *ultimate*, nanti YIA bisa menampung hingga 45 juta orang pertahun," ungkapnya. (Rul)-f

Sambungan hal 1

Menaker

Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan Pemerintah. Dalam hal pekerjaan bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Apabila wilayah tidak menetapkan UMK, maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Menurut Permenaker tersebut, besaran BSU yang dibebaskan Rp 500.000 perbulan selama dua bulan atau total Rp 1 juta dan akan disalurkan sekaligus.

Permenaker yang baru menegaskan, jika pemberi kerja tidak memberikan data pekerja yang sebenarnya maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika penerima tidak memenuhi persyaratan tapi telah menerima BSU maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan

sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga memprioritaskan pemberian BSU bagi pekerja yang belum menerima bantuan lewat program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro. (Ant)-f

Sambungan hal 1



Prakiraan Cuaca		Jumat, 30 Juli 2021				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dimi Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-31	60-95
Sleman					21-31	65-95
Wates					22-31	60-95
Wonosari					22-31	65-95
Yogyakarta					22-31	65-95



Anggrismono, S.E., M.Ec.Dev.
Kaprodi Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta
Kritik terhadap bank syariah meningkat dalam beberapa saat ini. Setelah sebelumnya seorang tokoh masyarakat memprotes margin pembiayaan di bank syariah, ditambah lagi baru-baru ini viral berita yang mengeluhkan praktik perbankan syariah yang tidak menerapkan prinsip syariah dalam layanan pembiayaannya. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh seorang pengusaha yang diundang pada acara podcast

Pembiayaan di Bank Syariah



terkenal. Meskipun polemik ini telah selesai dengan permintaan maaf dari sang pengusaha namun hal demikian dapat berdampak negatif kepada industri perbankan syariah yang hingga saat ini pangsa pasarnya masih stagnan di kisaran 6 persen di industri perbankan tanah air.

Layanan pembiayaan di bank syariah jika ditilik dari sisi bisnis terdapat kesamaan dengan penyaluran kredit di perbankan konvensional. Keduanya menjadi salah satu aktivitas yang dominan dilakukan terutama untuk mendorong pendapatan perbankan. Bedanya jika di bank konvensional yang menjadi objek akad pinjaman (kredit) adalah uang, lain halnya dengan layanan pembiayaan syariah yang menjadikan barang atau produk sebagai objek akadnya. Selain itu

dalam layanan pembiayaan syariah umumnya menggunakan akad jual beli sehingga tidak dikenal adanya tambahan bunga dalam pembayaran angsurannya. Sehingga istilah kredit hanya dikenal di bank konvensional, sedangkan pada layanan bank syariah istilah yang digunakan adalah pembiayaan. Sepintas sulit membedakan keduanya hingga seringkali terminologi bunga muncul dalam pembahasan terkait bank syariah, termasuk di acara podcast dengan bintang tamu pengusaha tersebut. Hal tersebut bisa jadi karena lemahnya literasi terkait dengan akad-akad syariah yang ada atau bisa juga karena masih adanya penyimpangan praktik syariah oleh oknum bank syariah itu sendiri. Wallahu'alam. Sejatinya pembiayaan di bank dan kredit di bank

konvensional adalah dua hal yang berbeda. Pembiayaan dalam bank syariah pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan pembiayaan untuk kegiatan atau aktivitas tertentu. Oleh karenanya tidak dikenal istilah debitur atau kreditor seperti di bank konvensional. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank syariah kepada nasabah tersebut dibedakan dari akad yang digunakannya. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa atau sewa beli, dan akad lainnya. Terdapat pula akad pinjam-meminjam yang namun tanpa tambahan kelebihan atas pokok pinjamannya.

Dalam akad jual beli pada umumnya terdapat tiga jenis skema pembiayaan yaitu salam,

istisna dan murabahah. Dalam kasus pengusaha diatas, yang bersangkutan menggunakan skema murabahah.

Pembiayaan dengan skema murabahah ini berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli) pada saat akad. Besarnya margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembiayaan dengan skema murabahah diantaranya pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan pemilihan rumah, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna.

S k e m a m u r a b a h a h

menghuskan bank menyediakan terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh calon nasabah sebelum dilakukannya akad. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi bank syariah untuk menguasai dan memiliki terlebih dahulu barang yang menjadi objek akad sebelum melakukan akad jual beli dengan calon nasabah.

Namun demikian ketika bank syariah telah menyediakan objek akad tetapi akad yang dimaksud batal diwujudkan maka tidak ada konsekuensi apapun yang akan diterima oleh para pihak. Semua pemenuhan atas berbagai syarat inilah yang kemudian menjadikan pembiayaan syariah khususnya skema murabahah bisa menjadi solusi yang menentramkan bagi semua pihak. (*)